



Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (Simakayu) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Indramayu

Rin Riyati^{1*}, Mukarto Siswoyo², Siti Khumayah³
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia
Email: rinriyati25@gmail.com

*Correspondence

ABSTRAK

Kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data Pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan SIMAKAYU sebagai pusat data yang akurat, terkini, terintegrasi dan terpadu. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan study literatur, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teori yang digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) ini menggunakan Teori George C. Edward III yang dipengaruhi 4 dimensi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) menunjukkan belum efektif kendala nya yaitu kompetensi pegawai di bidang teknologi Informasi masih kurang. Kesadaran pegawai dalam mengupdate data kepegawaian masih rendah. Anggaran untuk sarana dan prasarana masih belum memadai. Standar Operasional Prosedur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) belum ada. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala. Reward dan punishment belum diterapkan sehingga kurang memotivasi pegawai/ pelaksana kebijakan untuk aktif mengimplementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian Indramayu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

The policy for implementing the Indramayu Personnel Management Information System has been stipulated in the Indramayu Regent's Regulation Number 55 of 2023 concerning Data Management in the Personnel Management Information System within the Indramayu Regency Government. The aim of Regent Regulation Number 55 of 2023 is to realize SIMAKAYU as an accurate, up-to-date, integrated and integrated data center. The methodology used in this research is a descriptive qualitative approach, data collection techniques using literature study, observation, interviews and documentation. Testing the validity of the data uses triangulation techniques. The theory used in research on the Implementation of Indramayu Personnel Management Policy (SIMAKAYU) uses George C. Edward III's theory which is influenced by 4 dimensions, namely: communication, resources, disposition/ attitude of implementers and bureaucratic structure. The results of research on the Implementation of the Indramayu Personnel Management Information System Policy (SIMAKAYU) show that the obstacle is that it is not yet effective, namely that employee competence in the field of information technology is still lacking. Employee awareness in updating personnel data is still low. The budget for facilities and infrastructure is still inadequate. Standard Operational Procedures for the Indramayu Personnel

Management Information System (SIMAKAYU) application do not yet exist. Monitoring and evaluation have not been carried out regularly. Rewards and punishments have not been implemented so there is little motivation for employees/policy implementers to actively implement the Indramayu Personnel Information System Policy.

Keywords: *policy implementation, indramayu personnel management information system, state civil apparatus.*

PENDAHULUAN

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah cita-cita bangsa Indonesia (Kamaluddin, 2019). Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan good governance dengan berupaya melakukan reformasi di segala kegiatan pemerintahan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi (E-government) (Prabawa, 2023). E-Government di Indonesia, mulai diterapkan dan diperkenalkan pada tanggal 24 April 2001 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), Inpres ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah harus menggunakan teknologi informasi dan telematika dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan mempercepat proses demokrasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang melaju sedemikian pesat, khususnya selama beberapa tahun terakhir ini, telah mengantarkan peradaban umat manusia masuk ke dalam era informasi, dimana teknologi informasi menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan (Mustabsirah, 2021). Era baru ini semakin terasa di Indonesia dengan semakin meningkatnya peranan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang pemerintahan. E-Government adalah bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan (Capah, 2018).

Dalam konteks aplikasi penerapan teknologi informasi manajemen kepegawaian telah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas layanan public (Haris, 2015). Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu sebagai Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian telah menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) (Sulistiani, 2017). Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat memantapkan layanan data informasi kepegawaian sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan informasi data kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan terupdate (Muhammad et al., 2023). Digunakan secara mobile dan flexible dengan mengkonversi data manual menjadi data digital kedalam suatu database aplikasi dan terkomputerasi dalam suatu wadah berbasis web yang disebut Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU). Memberikan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pengolahan, penyimpanan, penyajian dan rekapitulasi informasi yang terkait dengan informasi kepegawaian yang dibutuhkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Menurut (Herry & Guntara, 2022) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Selanjutnya administrasi juga memiliki ciri-ciri pokok yang disampaikan oleh Silalahi (2011:10) yaitu:

- a. Sekelompok orang adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang;
- b. Kerja sama adalah kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama;
- c. Pembagian kerja adalah kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerja sama, melainkan kerja sama tersebut harus didasarkan pada pembagian kerja yang jelas;
- d. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan;
- e. Tujuan adalah sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerja sama (Saputra, 2023). Administrasi akan berjalan apabila terdapat sekelompok orang kemudian melaksanakan suatu kerjasama yang dibutuhkan. Hasil dari kerjasama itu adalah terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara runtut dalam suatu proses yang melewati tahapan-tahapan yang saling berhubungan selanjutnya setelah kegiatan tersebut dilaksanakan maka tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai.

METODE

Metode yang penulis gunakan untuk menyelesaikan tesis ini yaitu menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Tujuan menggunakan metode deskriptif adalah untuk memaparkan situasi /keadaan melalui teks yaitu mendeskripsikan sebuah variable yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diamati. Menurut (Situmorang, 2023) metode deskriptif yaitu metode yang sifatnya spesifik dalam suatu tindakan untuk mengungkapkan sebuah perkara atau kasus sesuai adanya sehingga lebih berguna untuk menghasilkan fenomena, menekankan representasi selaku objektif mengenai situasi yang semestinya. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini ialah peneliti harus mendiskripsikan pemecahan masalah dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu melalui pengamatan dan data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan Model George C. Edward III (Komunikasi, Sumber daya, Sikap pelaksana dan struktur birokrasi).

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif mempunyai tujuan memperoleh pemahaman, penafsiran dan pengetahuan yang mendalam mengenai makna dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori dasar (grounded Theory) dimana peneliti memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari partisipan, dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data dianalisis melalui proses pengkodean terbuka dan selektif dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) di Pemerintah Kabupaten Indramayu. Informasi penelitian dalam penelitian ini adalah Personal yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu, sebanyak 40 (Empat Puluh) orang ASN yang merupakan personil yang terlibat langsung dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu.

Teknik Pengumpulan Data melalui studi literatur / kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, konsep penelitian yang akan dioperasionalkan adalah teori implementasi kebijakan publik menurut George C Edwards III yang meliputi : komunikasi, sumber

daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yang lebih memfokuskan pada pemanfaatan sumber-sumber data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Analisis data deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, Verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum lokasi penelitian

Berdasarkan data SIPD tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 309 Desa, 1.689 Rukun Warga dan 6.202 Rukun Tetangga. Dari 31 kecamatan tersebut, Kecamatan Gantar memiliki jarak terjauh dari ibu kota kabupaten, yakni sejauh 71 Km. Sebagai salah satu kawasan pesisir, terdapat 36 desa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan memiliki perbatasan dengan Laut Jawa dengan total panjang garis pantai 147 Km. Dengan kondisi ini, maka banyak dari penduduknya yang aktivitas perekonomiannya berbasis perikanan dan kelautan.

Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Perangkat Daerah kabupaten Indramayu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

Pegawai Pemerintah

Pegawai Pemerintah merupakan Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan Data Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu, bahwa jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada tahun 2024 sebanyak 9.807 ASN.

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang- undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Lester dan Stewart dalam Winarno (2011;147) menyebutkan : Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang mempunyai arti pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu ini telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data Pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu . Tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan SIMAKAYU sebagai pusat data yang akurat, terkini, terintegrasi dan terpadu.

Pengukuran efektifitas penerapan peraturan bupati tersebut, merupakan pengukuran terhadap tingkat implementasi kebijakan implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Indramayu, Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu : Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi/Sikap pelaksana; Struktur birokrasi.

Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa dimensi komunikasi pada Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAKAYU) bagi PNS di kabupaten Indramayu sudah efektif. Karena komunikasi antar pegawai di Pemerintah Kabupaten Indramayu sangat baik, semua informasi telah disampaikan dengan jelas kepada seluruh pegawai. Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, media sosial seperti website, youtube, instagram, facebook dan whatsapp group. Superadmin BKPSDM sangat responsive melayani pegawai yang konsultasi karena adanya hambatan di aplikasi SIMAKAYU.

Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis menyimpulkan bahwa dimensi sumber daya pada Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAKAYU) bagi PNS di kabupaten Indramayu masih belum efektif karena jumlah pegawai yang ada di setiap Perangkat Daerah masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Kompetensi pegawai yang ada belum seluruhnya bisa mengoperasikan aplikasi SIMAKAYU sehingga menghambat untuk melakukan update data kepegawaian secara rutin. Dalam segi anggaran yang ada di Perangkat Daerah masih banyak yang belum mencukupi kebutuhan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung (Syahrin, 2021).

Dimensi Disposisi

Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Informan kunci bila dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (dalam Hessel Nogi Tangkilisan, M.Si, Drs, 2023) dapat diketahui bahwa kondisi yang ada pimpinan sangat mendukung kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu hal ini disampaikan melalui rapat dan apel pegawai, para pegawai menerima dengan implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) namun kesadaran pegawai untuk mengupdate data kepegawaian bila ada perubahan data baru masih rendah harus selalu diingatkan. Rendahnya kesadaran update data kepegawaian ini menyebabkan sering ditemukan perbedaan data di aplikasi SIMAKAYU dengan SIASN BKN ketika pegawai mengurus kenaikan pangkat atau mengurus usulan pensiun. Bila di lihat kondisi yang ada maka Penulis menyimpulkan bahwa dimensi disposisi / sikap pelaksana pada Implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi PNS di Kabupaten indramayu belum efektif.

Dimensi Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara Penulis dengan Informan diperoleh hasil bahwa koordinasi antar pegawai sudah baik, kejelasan tugas dan wewenang sudah sesuai, sudah disosialisasikannya Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Data dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu, akan tetapi Standar Operasional Prosedur tentang aplikasi SIMAKAYU belum ada, monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala sehingga masih sering terjadi perbedaan data yang ada di aplikasi SIMAKAYU dengan SI ASN BKN. Belum ada reward bagi pegawai yang aktif mengupdate data kepegawaiannya dan belum ada punishment bagi pegawai yang tidak mengupdate data kepegawaiannya. Bila reward dan punishment sudah diterapkan maka akan meningkatkan semangat kinerja pegawai sehingga dapat terciptanya budaya kerja yang baik. Dari hasil penelitian yang

telah dilakukan Penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dimensi struktur birokrasi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAKAYU) bagi PNS di kabupaten Indramayu masih belum efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu

Faktor -faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu adalah komunikasi, jika komunikasi dan tujuan dapat tersampaikan kepada pelaksana kebijakan dengan baik maka tujuan implementasi kebijakan akan mudah tercapai . Sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana yang menerima kebijakan berupa dukungan dari pimpinan akan memotivasi pegawai untuk berperan aktif terwujudnya implementasi kebijakan. Harus adanya peraturan produk hukum dan Standar Operasional Prosedur.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Impelentasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu

Hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu adalah kurangnya sumber daya manusia dan kompetensi pegawai sehingga kesadaran mengupdate data kepegawaian masih kurang, anggaran untuk sarana dan prasarana masih belum memadai. Standar Operasional Prosedur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) belum ada. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala. Reward dan punishment belum diterapkan sehingga kurang memotivasi pegawai/ pelaksana kebijakan untuk aktif mengimplementasi Kebijakan Sistem Informasi Kepegawaian Indramayu.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Ketidak Efektifan Impelentasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) Bagi ASN Di Kabupaten Indramayu

Upaya -upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakefektifan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu adalah melakukan sosialisasi bagi pegawai, menyusun regulasi berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU), mengusulkan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai merupakan upaya penguatan organisasi level organisasi. Upaya memperkuat komitmen dalam melaksanakan tugas dan implementasi kebijakan merupakan upaya penguatan organisasi level individu. Upaya melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan koordinasi merupakan penguatan organisasi level sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) bagi ASN di Kabupaten Indramayu bahwa pada dimensi komunikasi sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari komunikasi antar pegawai di Kabupaten Indramayu sangat baik, semua informasi telah disampaikan dengan jelas kepada seluruh pegawai. Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi langsung, media sosial seperti website, youtube, instagram,facebook dan whatshap group. Bila ada pengaduan dari pegawai, respon superadmin BKPSDM sangat responsive melayaninya. Dimensi sumber daya masih belum efektif hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang ada disetiap Perangkat Daerah masih belum dapat memenuhi

Rin Riyati, Mukarto Siswoyo, Siti Khumayah

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (Simakayu) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Indramayu

kebutuhan yang ada, kompetensi pegawai yang ada belum seluruhnya bisa mengoperasikan aplikasi SIMAKAYU sehingga menyebabkan update data kepegawaian belum maksimal. Dalam segi anggaran yang ada di Perangkat Daerah masih banyak yang belum mencukupi kebutuhan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung. Pada Dimensi Disposisi/ sikap pelaksana belum efektif, kondisi yang ada dari pihak pimpinan sangat mendukung kebijakan ini disampaikan melalui rapat dan apel pegawai, akan tetapi dari pihak pegawai menerima dengan implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (SIMAKAYU) namun kesadaran pegawai untuk mengupdate data kepegawaian bila ada perubahan data baru masih rendah harus selalu diingatkan. Rendahnya kesadaran update data kepegawaian ini menyebabkan data yang ada di aplikasi SIMAKAYU dengan SIASN BKN masih belum sama. Untuk dimensi struktur birokrasi masih belum efektif, karena belum adanya Standar Operasional Prosedur tentang aplikasi SIMAKAYU, monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMAKAYU) belum dilakukan secara berkala sehingga masih terjadi perbedaan data pegawai yang ada di aplikasi SIMAKAYU dengan data pegawai yang ada di SI ASN BKN. Belum adanya reward dan punishment yang dapat meningkatkan budaya kerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Capah, R. P. (2018). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 4 (11) Maret 2025- (5133-5140)

Rin Riyati, Mukarto Siswoyo, Siti Khumayah

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Indramayu (Simakayu) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten Indramayu

Haris, O. K. (2015). Good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pemberian izin oleh pemerintah daerah di bidang pertambangan. *Yuridika*, 30(1), 58–83.

Herry, A. S., & Guntara, B. (2022). Terwujudnya Good Governance Melalui Eksistensi Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 1702–1711.

Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.

Muhammad, H., Ahmad, F., Fitriani, L., Nurhaeda, Z., & Giri, D. (2023). *Rencana Strategi Pengembangan Koperasi, Umkm Dan Industri Kabupaten Luwu*.

Mustabsirah, P. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan*.

Prabawa, A. A. N. M. P. (2023). Optimalisasi Peran Bhabinkamtibmas dalam Penanggulangan Kelompok Radikal di Polres Brebes. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(11), 1–82.

Saputra, H. (2023). *Efektivitas Mal Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kota Jambi*. Ilmu Pemerintahan.

Situmorang, K. T. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. Ipdn.

Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1–15.

Syahrin, Y. (2021). *Peran Humas Kabupaten Padang Pariaman Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19*. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).